



► REVISI PERDA

Kelembagaan Wilayah Bakal Diubah

UMBULHARJO—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja bakal merevisi peraturan daerah mengenai kelembagaan. Nantinya, kelembagaan wilayah seperti RT dan kampung kemungkinan bisa menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dana keistimewaan (Danais).

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi mengatakan sudah ada rancangan revisi Perda Kelembagaan Wilayah. Selama ini keberadaan kampung didasarkan pada Peraturan Wali Kota karena kebutuhan untuk menjadikan kampung sebagai subjek tiap pembangunan.

Namun di lapangan muncul persoalan-persoalan seperti pembentukan kampung. Persoalan ini termasuk hubungan kampung dan RT/RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang masih kurang bagus dalam struktur organisasi dan hierarkinya.

“Nantinya perda itu memuat tentang bagaimana posisi RT/RW, kampung, LPMK dan kelurahan serta kemantren atau unit pelaksana kelembagaan di wilayah. Semuanya nanti berdasarkan pada sumber hukum yang sama,” kata Heroe, Selasa (19/4).

Dalam rancangan revisi perda tersebut juga akan diatur struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi masing-masing lembaga wilayah. Selain itu hal-hal yang membedakan RT/RW, kampung, LPMK, kelurahan dan kemantren akan dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki alih hak yang jelas.

Selama ini kampung dianggap sebagai salah satu pranata dari Keistimewaan Jogja, dengan mengembalikan kelembagaan-kelembagaan tradisional. Oleh karena itu di Kota Jogja ada kampung, kelurahan, dan kemantren sehingga diharapkan selain mendapatkan dukungan dana dari APBD akan mendapat juga dari Danais.

“Makanya salah satu upaya kami adalah menata dan mengembangkan kembali agar struktur organisasi betul-betul bisa berjalan dengan signifikan. Harapan kami perda revisi ini segera kami ajukan, supaya mendapatkan pengesahan bersama dari DPRD. Salah satu tujuan pemberdayaan ini bisa mengalokasikan anggaran untuk RT/RW, kampung dan LPMK berdasarkan dana dari APBD maupun danais,” kata Heroe.

Selain itu juga dilakukan penyesuaian masa jabatan yang saat ini berbeda antara Ketua RT/RW, LPMK dan kampung. Ada yang tiga tahun dan lima tahun. Nantinya akan ada penyamaan masa periode jabatan. Selain memudahkan perencanaan pembangunan daerah, harapannya bisa lebih efisien.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkot Jogja Retnaningtyas mengatakan kegiatan penguatan kelembagaan kampung rutin dilakukan.

“Ini adalah pertemuan ketiga untuk penguatan kampung se-Kota Jogja. Ada 169 kampung di Kota Jogja yang tiap tahun kami adakan penguatan,” kata Retnaningtyas. *(Sirojul Khatid)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat			

Yogyakarta, 18 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005